

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Globalisasi telah menjadi kenyataan sehari-hari yang tidak dapat dihindari. Prosesnya berlangsung sangat cepat dan kompleks yang menjangkau segala aspek dan telah meresap ke berbagai bidang yaitu bidang ekonomi yang ditandai dengan berlakunya pasar bebas, penjualan barang produk negara lain secara bebas di sebuah negara. Bidang politik, ditandai dengan berkembangnya masyarakat yang demokratis. Bidang sosial, ditandai dengan lahirnya kesadaran global bahwa manusia semakin merasa saling tergantung dan membutuhkan, dan bidang ekologi yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam.

Globalisasi telah banyak memberikan peluang bagi negara-negara *emerging power* atau negara-negara berkembang menuju negara-negara industri maju. Dengan adanya fenomena ini telah memberikan wadah kerjasama baru dalam berbagai macam bidang ekonomi, politik, teknologi dan lainnya.

Cina menjadi salah satu negara *new emerging power* bersamaan dengan munculnya fenomena globalisasi. Cina merupakan salah satu negara mempunyai potensi yang cukup banyak untuk menjadi negara super power dengan ekonomi paling besar di dunia. Sejak diperkenalkannya reformasi Cina tahun 1978 Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia selain itu Cina merupakan negara eksportir dan importir terbesar di dunia, Cina merupakan

negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar di dunia sehingga sejumlah kalangan menilai bahwa Cina diprediksikan sebagai negara *superpower* di masa depan. Cina mampu berkembang dan tampil sebagai the new miracle of Asia, yang sejajar dengan Jepang, Singapura, dan Korea Selatan yang menjadi pusat keajaiban ekonomi Asia.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong Cina melakukan ekspansi pasar secara besar-besaran. Bahkan penetrasi ekonominya ke global meresahkan sejumlah negara-negara tetangga seperti, Jepang, dan Korea Selatan yang juga menjadi negara ekonomi maju. Salah satu momen penting yang dimanfaatkan oleh Cina dalam ekspansinya pasar global adalah terbukanya keran perdagangan bebas ACFTA.

Dalam pertemuan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja 2 September 2003, politisi Cina mendekati negara-negara ASEAN dan menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan AFTA se hingga menjadi ASEAN Plus Three. Cina menilai potensi pasar ASEAN termasuk besar karena didukung oleh 530 juta penduduk yang memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi (www.unisosdem.org). ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) adalah sebuah persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nation*) dengan Cina. Persetujuan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara ASEAN dan Cina pada tanggal 29 November 2004. Dalam kerjasama ini, hambatan-hambatan tarif dan non-tarif dihilangkan atau dikurangi dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas dalam kawasan regional ASEAN dan Cina. Seluruh pihak kini

telah memalingkan muka dari barat ketimur,berharap pertumbuhan global akan di topang negara-negara berkembang dan negara industri baru. Kebangkitan Cina serta intensitasnya yang tinggi dalam interaksinya dengan negara-negara di Asia tenggara dengan Asia timur lainnya menjadi suatu alternatif penopang pertumbuhan internasional yang belakangan meradang.

Perdagangan bebas ASEAN-Cina dimulai pada awal tahun 2010, ini berarti perdagangan di Asia Tenggara dan Cina mengadopsi sistem baru, yaitu sistem yang bebas hambatan. Tarif dan bea masuk yang selama ini dianggap sebagai penghambat telah dihapuskan agar semua komoditas yang diperdagangkan mendapat perlakuan sama di kawasan tersebut. Kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina merupakan akibat dari adanya globalisasi yang secara tidak langsung memaksa negara-negara untuk melakukan kerja sama guna mempertahankan eksistensinya di dunia Internasional.

ACFTA sebagai wadah untuk berinteraksi dan menjalin kerjasama antar negara yaitu Cina dengan negara-negara di asia tenggara, Cina sangat banyak memberikan bantuan kepada negara di asia tenggara setelah adanya ACFTA yang pada umumnya merupakan negara berkembang dan membutuhkan bantuan untuk membangun perekonomiannya. Salah satu bantuannya adalah Cina menawarkan program bantuan pengembangan UKM Asean kedua Cina menyatakan komitmennya untuk menyediakan bantuan teknis kepada sekretariat Asean untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan butir-butir rencana yang telah

disepakati yang ketiga Cina memfasilitasi perdagangan ASEAN dengan mendirikan kelompok kerja resolusi perdagangan dan bantuan langsung.

Tetapi dengan adanya ACFTA mendukung Cina menjadi negara *Super Power* di Asia yang dapat menghegemoni negara-negara di Asia Tenggara. Cina merupakan negara eksportir barang terbanyak di Asia Tenggara (kemenprin.go.id). Hal ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara anggota ASEAN dimana penetrasi dan tekanan pasar Cina akan semakin besar. Cina tumbuh sebagai raksasa ekonomi dunia selama dua dekade terakhir juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kebangkitan ekonomi Cina yang di inisiasikan oleh oleh revolusi industri Den Xiaoping . Selama tahun 1990-2005, ekspor Cina mengalami peningkatan sebesar dua puluh lima kali lipat, dibandingkan dengan peningkatan sebesar empat kali lipat yang dialami dua belas negara eksportir terbesar di dunia pada periode yang sama (Mantra, 2011). Pada tahun 2005, ekspor Cina mencapai sebesar 25 persen dari total ekspor seluruh negara selain dua belas eksportir teratas (Mantra, 2011).

Walaupun pada awalnya ACFTA ini bertujuan untuk memberikan keuntungan satu sama lain, dan menciptakan keseimbangan perdagangan (*Balance Trade*) antara negara di ASEAN, dengan bea masuk barang dari luar negeri dihilangkan (Chandra, 2011). Ini menunjukkan bersaingnya produk yang diperdagangkan antara Cina dan negara anggota ASEAN. Namun pada kenyataannya, Cina menjual barang ke negara lain dengan harga yang sangat murah dan bahkan mengalahkan produksi dalam negeri, sehingga barang Cina membanjiri pasar di Asia Tenggara, sehingga berlakunya ACFTA diprediksi akan

menyebabkan industri dalam negeri merugi terutama industri manufaktur.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang juga ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kesepakatan ACFTA, Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk lebih meningkatkan perekonomian Indonesia yang sehat dan produktif. Maka dari itu ACFTA akan menjadi fondasi penting membangun arsitektur ekonomi yang bebas dan adil (www.solopos.com). Akan tetapi, cita-cita tersebut harus dimaknai secara kritis dimana kehadiran Cina dalam pasar manufaktur Indonesia hanya menguntungkan sepihak yaitu Cina. Terlihat bahwa pola yang tercipta adalah dominasi ekonomi Cina terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa asumsi seperti neraca perdagangan dengan Cina yang dulunya surplus pada akhirnya menunjukkan defisit. Neraca perdagangan non-migas Indonesia-Cina mengalami defisit yang semakin tinggi, dimana pada tahun 2007 sebesar 1,3 miliar dollar AS menjadi 9,2 miliar dollar AS pada tahun 2008. Pada tahun 2009 Cina telah menjadi sumber utama impor Indonesia, yakni sebesar 17,2 persen dari total impor non-migas dan sebaliknya Cina hanya menyerap 8,7 persen ekspor non-migas Indonesia.

Saat ini, Cina menjadi negara importir barang terbesar Indonesia. Impor barang yang berasal dari Cina didominasi oleh industri manufaktur seperti, mesin-mesin, otomotif, elektronika, tekstil dan lainnya. Meskipun import produk manufaktur Cina merupakan pemenuhan ketersediaan barang dalam negeri. Akan tetapi pola dominasi produk manufaktur yang terwujud melalui kerangka ACFTA merugikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sebelum diberlakukan ACFTA,

pada tahun 2009 total perdagangan Indonesia dan Cina baru mencapai US\$ 25,5 milyar, terdiri dari ekspor sebesar US\$ 11,5 milyar dan impor sebesar US\$ 14,0 milyar. Dengan demikian defisit neraca perdagangan mencapai US\$ 2,5 milyar. Semenjak pasar bebas Asean Cina (ASEAN-CHINA Free Trade Area) mulai diberlakukan mulai Januari 2010, maka berbagai produk manufaktur dari Cina memasuki pasar Indonesia dengan deras. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata bahwa berbagai jenis barang elektronik yang berharga murah dari Cina mulai menggerogoti pasar elektronik lokal. Demikian juga produk lainnya seperti besi baja, tekstil, dan barang hasil industri lainnya (datacon.co.id).

Pola dominasi Cina melalui ACFTA membuat Industri manufaktur dalam negeri akan kalah saing dengan produk manufaktur yang masuk dari Cina. Hal ini membuat industri manufaktur Indonesia akan semakin kerdil, sehingga pemerintah akan terus bergantung pada import manufaktur dari Cina. Dampak buruk dari ketergantungan tersebut adalah cenderung menciptakan defisit perdagangan Indonesia, dan parahnya akan menghasilkan krisis ekonomi bagi Indonesia (LEMHANNAS, 2012).

Maka dari itu penulis melihat pentingnya untuk merefleksikan kembali ACFTA sebagai sarana perdagangan bebas negara-negara anggota ASEAN-Cina. Pola kerjasama ekonomi tersebut hanya menciptakan dominasi ekonomi Cina melalui industri manufaktur, yang akan berdampak buruk bagi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil rumusan masalah:

Faktor-faktor apa yang menjadikan produk manufaktur Cina mendominasi pasca berlakunya ACFTA ?

C. Tujuan Penelitian

Gambaran permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuat kajian mendalam dampak dari hubungan ACFTA Cina dengan negara-negara di ASEAN terutama Indonesia dalam dominasi Cina terhadap pasar Industri manufaktur di Indonesia.
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi dunia pendidikan, dan tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan masyarakat, dan kalangan akademisi, sehingga timbulnya kesadaran akan dominasi Cina di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Neoliberalisme. Neoliberalisme akan menjelaskan penandatanganan ACFTA akan berdampak pada dominasi pasar Indonesia oleh Tiongkok, sehingga berpengaruh pada kondisi Industri Manufaktur Indonesia.

1. Imperialisme Strukturalis

Teori imperialisme strukturalis adalah salah satu teori dikemukakan oleh Johan Galtung, yang mendasarkan prinsip dominasi salah satu negara dengan

negara lainnya baik dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Imperialisme menurut Galtung (1971) secara sederhana, yaitu corak hubungan di mana sebuah masyarakat mendominasi masyarakat lain. Ini bisa berlangsung secara parsial atau sebagian atau struktural atau keseluruhan.

Pada dasarnya imperialisme strukturalis didasarkan pada konsepsi ketergantungan, dimana terdapat negara *center* dan *periphery*, negara *center* yang sering disebut sebagai negara maju dan *periphery* adalah negara berkembang atau negara dunia ketiga. Dalam melakukan dominasi kenegara *periphery*, terdapat beberapa actor yang memainkan perannya yaitu masyarakat di negara *center* yang memiliki strata elit yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di negara *periphery*, sehingga kondisi ini menghasilkan negara *center* memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan negara *periphery* (Galtung, 1971).

Dalam interaksi *center* dan *periphery*, Galtung (1971) menjelaskan bahwa dalam interaksinya terdapat dua model interaksi yaitu *intra actor* dan *inter actor*. Interaksi *intra actor* adalah hubungan yang tercipta antara masyarakat dalam satu negara yang mempunyai nilai yang berbeda, dan *inter actor* adalah hubungan yang terjalin antara masyarakat berbeda negara. Mekanisme imperialisme yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Mekanisme Imperialisme Struktural Bekerja antara
Center dan Periphery**

	A ('developed')		B ('developing')	
	inter-actor effects	intra-actor effects	inter-actor effects	intra-actor effects
<i>positive (in)</i>	raw materials	spin-offs	manufactured goods	little or nothing
<i>negative (out)</i>	manufactured goods	pollution, exploitation	raw materials	depletion, exploitation

Sumber: *A Structural Theory of Imperialism*

Dalam hal ini menggambarkan struktur pemasukan dari negara center adalah dalam bentuk *raw materials* sedangkan struktur keluarannya adalah berbentuk *manufactured goods*. Dan bagi negara periphery struktur pemasukannya adalah berbentuk *manufactured goods* sedangkan struktur pengeluarannya adalah *raw material*. Berdasarkan gambar diatas terdapat perbedaan mendasar dalam efek yang termuat di interkasi. Ini terutama sekali terlihat dalam tingkat pengolahan. Dalam negara produsen, bahan mentah hampir tidak ada efek intra-aktor (dalam negeri) yang positif. Sementara dalam negara yang memproduksi *manufactured goods*, efeknya sangat luas karena kompleksitas produk dan keterkaitannya dengan masyarakat.

Menurut Galtung (1971), agar eksploitasi terselubung ini bisa langgeng, harus ada kerjasama antara elit di negara maju dengan elit di negara berkembang. Dalam hal mekanisme, penetrasi merupakan faktor yang menentukan. Gagasan dasar penetrasi adalah negara maju memenetrasi 'di bawah kulit' negara berkembang dengan membangun di sana. Yang disebut jembatan penghubung antara elit-elit negara berkembang yang akan berperan penting dalam struktur keseluruhan imperialisme. Di negara berkembang elit ini adalah kalangan

berpendidikan tinggi, memiliki status sosial ekonomi tinggi, memiliki mobilitas tinggi dan menempati posisi menentukan dalam proses pengambilan kebijakan.

Hubungan diatas membuat posisi dominasi negara *center* atas *periphery* sangat mungkin terjadi. hubungan ini berlangsung sejak lama, tapi bentuknya berbeda-beda. Semula negara Barat menjajah dan mengeksploitasi negara non-Barat dengan pemaksaan menggunakan kekuatan militer. Kini penjajahan dilakukan secara halus. Sebagai analogi, penjajahan secara halus tampak pada pola pertukaran yang didasarkan pada *Comparative Advantages*. Misalnya, negara berkembang memasok bahan mentah (seperti minyak, gas bumi, hasil pertanian), sementara negara maju memasok barang manufaktur. Dalam pola hubungan ini, seolah-olah terjadi interaksi simetris. Padahal sebuah jurang sangat mungkin terbuka dan melebar sebagai akumulasi dari yang diperoleh kedua belah pihak dari pertukaran itu.

Dalam kasus perjanjian ACFTA, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara *periphery* dan Cina dapat dikatakan sebagai negara *center*. Dimana hubungan perdagangan Indonesia-Cina, Indonesia sangat besar memasok barang dalam bentuk raw material ke Cina, sedangkan Cina melakukan penetrasi pasarnya ke Indonesia melalui produk-produk manufakturnya yang memasuki Indonesia. Faktanya produk asal Jepang ke Indonesia mulai redup dan ditinggalkan. Sementara Cina mulai agresif dan mendominasi pasar Indonesia. selain barang-barang Cina memberikan nilai murah, tapi juga mampu menggantikan harga Jepang yang terbilang mahal (<http://www.suarakarya.id/>). Dengan terbukanya pasar bebas antara Indonesia-Cina melalui ACFTA ancaman

yang sangat besar adalah penguasaan pasar Indonesia oleh Cina. Sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN (*Asean-Cina Free Trade Agreement/ACFTA*) diberlakukan 1 Januari 2010, barang-barang Cina mulai dari peniti hingga mesin modal membanjiri pasar Indonesia. Maklum, dengan bea masuk 0%, barang-barang Cina leluasa masuk ke Indonesia. ACFTA memang membuat Cina makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. (<http://indonesianreview.com>).

2. Neoliberalisme

Neoliberalisme sebagai varian baru dari liberalisme, dapat dilihat dari sebuah pengertian yang sangat berbeda antara pengertian yang berjalan terutama di AS dengan pengertian awalnya yang berasal dari Eropa. Liberal dalam pemaknaan awalnya adalah sebuah mekanisme pasar yang bebas dari intervensi negara. Pemaknaan ini berubah ketika ekonomi Keynesian menjadi paradigma mainstream. Keynes merupakan pemikir liberalisme yang sangat menaggungkan konsep negara dalam pasar. Keynes beranggapan bahwa penguatan pada peran negara dalam pengendalian dan penguatan pasar, namun tetap menolak kecenderungan pemaknaan sosialis terhadap sistem ekonomi, sebagaimana yang berlaku pada negara-negara blok Soviet. Dari sini pergeseran pemaknaan liberal dimulai. Pada bagian lain, kaum liberal klasik yang tergabung dalam partai konservatif kanan mendengungkan kembali liberalisme tersebut yang kemudian terkenal sesuai dengan aliran politiknya yakni neo konservatif atau kanan baru (*new right*). Para teoritis dan pengamat kemudian menyebutnya dengan neoliberal sesuai dengan aliran pemikirannya yang merupakan metamorfosis dari pemikiran liberal klasik ala Adam Smith dan David Ricardo (Mas'ood, 1997).

Kritik terhadap Keynes melahirkan prinsip dasar neoliberalisme yang menekankan kembali peran pasar dan meruntuhkan peran negara kedalam pasar. Neoliberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neoliberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar (Fakih, 2001).

Pada awalnya Neoliberalisme merupakan suatu teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia paling bisa dicapai dengan cara meliberalisasikan kebebasan-kebebasan dan keterampilan-keterampilan entrepreneurial individu dan menetapkan kebebasan dan keterampilan tersebut ke dalam satu kerangka pranata yaitu pasar bebas dan perdagangan bebas (Harvey, 2009). Berdasarkan pemikiran tersebut pola pemikiran neoliberalisme, peraturan-peraturan ekonomilah yang harus menguasai sektor-sektor yang lain, bukan sebaliknya. Apa saja yang menghalangi perkembangan sektor ekonomi harus dicabut, termasuk peraturan-peraturan dan undang-undangan pemerintah.

Negara bukan lagi suatu lembaga yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, negara hanyalah sebagai lembaga atau badan yang mengurus dan mengusahakan bagaimana perekonomian bisa berjalan dengan lancar melalui regulasi sebagai penunjang. Maka, peraturan pemerintah harus memihak pada kebebasan pasar, terutama menghilangkan hambatan-hambatan pasar. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi perlu membebaskan kegiatan swasta dari peraturan dan kebijakan menghambat mobilitas, bahkan pemerintah harus menyediakan infrastruktur untuk mendukung mobilitas pasar disuatu negara (Harvey, 2009).

Saat ini praktek neoliberalisme telah menyebar keseluruh negara, dan hampir seluruh negara mempraktekkan dan mengimplementasikan neoliberalisme tersebut. Dapat dilihat dari arah interaksi negara yang makin teregionalisasi, munculnya pasar bebas antara negara, dan praktek lainnya seperti deregulasi, privatisasi, serta pemotongan subsidi, membuat neoliberalisme merupakan ideology yang umum diterapkan oleh negara-negara.

Di tingkat internasional, paham neoliberalisme berusaha untuk memudahkan perdagangan antara negara, supaya bahan-bahan, hasil bumi, dan perusahaan bisa bergerak secara lebih bebas dalam mencari bahan-bahan dan tenaga kerja yang lebih murah. Semua itu ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang paling tinggi. Menurut Neo-Liberalisme, salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan mencabut semua kontrol yang dianggap menghalangi pasar bebas, umpamanya tentang :

- Bea/cukai (tariffs).
- Peraturan pemerintah.
- Beberapa standar, undang-undang dll.
- Halangan investasi dan aliran lalu-lintas modal.

Walaupun beberapa kebijakan pemerintah tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan secara demokratis demi untuk memenuhi tuntutan atau keinginan rakyat, namun jika peraturan itu dianggap menghalangi pasar bebas, maka peraturan-peraturan itu tetap tidak sah dan harus dicabut kembali oleh pemerintah.

Salah satu contoh Negara yang menerapkan neoliberalisme adalah Amerika Serikat, Amerika Serikat merupakan salah satu Negara maju dan

mempunyai teknologi yang bisa dibilang sangatlah canggih dan infrastuktur yang memadai. Sebagai salah satu Negara yang mempunyai kekuatan politik ataupun ekonomi tidaklah sulit untuk Amerika memangsa pasar-pasar di Negara lainnya, berbeda dengan Indonesia yang memang bisa dikatakan sebagai Negara berkembang yang belum siap untuk bersaing dalam pasar bebas dan tidak mempunyai syarat-syarat seperti Negara maju yang mempunyai teknologi yang canggih dalam bidang perindustrian, ekonomi perdagangan bebas telah menciptakan ketimpangan dimana unit-unit usaha kecil di Negara-negara dunia ketiga kaalah bersaing. Negara-negara dunia ketiga harus bersaing dalam kondisi modal yang terbatas berhadapan dengan Negara-negara maju yang mempunyai sumber daya manusia dan mempunyai teknologi yang telah mapan

Dalam konteks pasar bebas ACFTA antara perdagangan Cina dengan Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia adalah merupakan salah satu implementasi dari teori neoliberalisme. Melalui ACFTA, hambatan-hambatan perdagangan antara Cina dengan negara ASEAN akan dihilangkan sepenuhnya. Pada kenyataannya, peran pemerintah Indonesia hanya sebagai pengambil kebijakan pro terhadap pasar, sehingga Indonesia pada forum ACFTA pada tahun 2004 meratifikasi perjanjian pasar bebas tersebut. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keuntungan bagi pasar untuk masuk dalam persaingan bebas di kawasan Asia Timur. Akan tetapi ACFTA menjadi ancaman besar bagi negara-negara ASEAN, dimana ekonomi Cina yang terus meningkat dapat menjadi kekuatan hegemonik di tingkat regional Asia Tenggara. Industri manufaktur Cina yang terus tumbuh dapat menjadi ancaman besar bagi negara-negara dengan

industri manufaktur yang lemah di ASEAN, dimana akan terjadi dominasi perdagangan antara ASEAN dan Cina.

Berdasarkan pola hubungan kerjasama Indonesia-Cina penulis melihat hubungan kerjasama pasar bebas Indonesia-Cina adalah sebatas hubungan dagang. Maka polanya hanya berbentuk ekspor dan impor produk, sehingga akan terjadi persaingan antara produk luar dan dalam negeri. Pola tersebut menunjukkan pasar yang sangat menentukan keberhasilan dalam persaingan industri antara Indonesia dengan Cina. Melalui hubungan perdagangan Cina mampu mengekspor produk manufakturnya ke Indonesia.

Pada dasarnya konsep perdagangan bebas yang ditawarkan oleh kaum neoliberalisme menciptakan keuntungan bagi pasar, akan tetapi hal ini tidak berlaku secara umum, karena faktanya masih banyak negara-negara yang menganut sistem pasar terbuka dan perdagangan bebas pada level regional akan tetapi masih tidak dapat terhindarkan oleh krisis ekonomi dan krisis politik. Walaupun Cina berhasil bangkit melalui system ekonomi terbuka akan tetapi Indonesia secara umum belum dapat dikatakan sebagai negara yang mampu berkembang di era pasar bebas. Posisi Indonesia dalam pasar bebas justru akan menunjukkan gejala negatif yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dimana berkurangnya kedaulatan negara karena pasar bebas akan menjadi penghalang intervensi negara pada pasar, sehingga pasar yang lemah akan tidak terkendali, bahkan cenderung dikuasai oleh negara lain. Pada akhirnya neoliberalisme dapat menjadi ancaman apabila pasar Indonesia tidak memiliki peranan dan daya saing yang tinggi atas perekonomian negara lainnya.

E. Hipotesis

Dominasi pasar Cina di Indonesia tahun 2014 disebabkan oleh beberapa factor antara lain :

“Ketidakseimbangan ekspor impor Indonesia-Cina,peranan industry manufaktur Indonesia semakin merosot,dan jumlah perusahaan manufaktur Indonesia makin menurun.”

F. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat jangkauan dan batasan permasalahan hanya pada dominasi Cina dalam industri manufaktur di Indonesia, dimana pola ini terbentuk diakibatkan adanya peran ACFTA dalam melancarkan ekspansi pasar industri manufaktur Cina pada tahun 2014. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis akan mengambil dan membahas sumber-sumber lainnya selama masih berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas pada tulisan ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang paling dasar dalam melaksanakan suatu penelitian. Hadi menjelaskan bahwa metodologi ialah salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian ilmiah karena ketepatan penggunaan metodologi dipergunakan sebagai dasar pemecahan permasalahan, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan (Hadi, 1996).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang diungkap dikumpulkan dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan kerangka berpikir. Pendekatan deskriptif berarti bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur fenomena-fenomena sosial tertentu dengan cermat dan disusun dan dijelaskan secara sistematis.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yang juga memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, situs internet serta catatan atau sumber informasi valid lainnya serta melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi beberapa instansi yang berkaitan dengan skripsi penulis.

2. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian disampaikan apa adanya, lalu dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah. Konsep yang ada digunakan untuk memahami masalah dalam penelitian ini.

Selanjutnya data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara sistematis tersusun dalam bab, yang dirangkai oleh sub bab-sub bab. Pengelompokan ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan jenis permasalahannya yang diteliti, kemudian dikomparasikan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

Bab I berisi pendahuluan penulisan yang dirangkai oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab II berisi mekanisme ACFTA dan dominasi Cina terhadap perdagangan di ASEAN. Serta membahas lebih dalam mengenai persetujuan perdagangan dan pasar bebas antara negara-negara ASEAN dengan Cina.

Bab III berisi dan kondisi faktual ekonomi Indonesia yang akan lebih konsen terhadap Industri Manufaktur Indonesia.

Bab IV berisi analisis dampak dominasi ekonomi Cina terhadap industri manufaktur di Indonesia dalam mekanisme ACFTA.

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh tulisan.

